Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 14314-14325

Peran Pemerintah Desa Dalam Perumusan Kebijakan Terhadap Perubahan Iklim Di Desa Tongke-Tongke

Mutahhara[1], Mursak[2], M. Erwin Syukri[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sinjai
Corresponding Author: mutahhara97@gmail.com[1], mursak.ucca@gmail.com[2], Muhammad.erwinsyukri@gmail.com[3]

Published: July , 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Tongke-Tongke Village Government in formulating policies on climate change. Climate change has had a significant impact, especially in coastal areas such as Tongke-Tongke Village, which is highly vulnerable to tidal flooding and waterlogging. This study uses a qualitative method with a case study approach, through interviews, observations, and document reviews. The results of the study show that the Tongke-Tongke Village Government plays three main roles in addressing climate change: as a policy implementer, program implementer, and mentor. In its role as a policy implementer, the village government actively disseminates policies through meetings with the community and also utilizes Friday prayers at the mosque to convey important messages. As a program implementer, the village government initiates mangrove planting, coastal embankment construction, and the opening and supervision of water channels. As a mentor, the village government regularly provides education and guidance to the community to increase awareness and participation in environmental conservation. In conclusion, synergy between the village government and the community is an important foundation in creating a resilient and sustainable coastal village in the face of climate change.

Keywords: Role, Village Government, Climate Change, Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam perumusan kebijakan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak signifikan, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Tongke-Tongke yang sangat rentan terhadap banjir rob dan genangan air. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tongke-Tongke menjalankan tiga peran utama dalam menghadapi perubahan iklim: sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, dan pembina. Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah desa aktif mensosialisasikan kebijakan melalui pertemuan dengan masyarakat, pemerintah desa juga memanfaatkan momen ibadah Jumat di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Sebagai pelaksana program, pemerintah desa menginisiasi penanaman mangrove, pembangunan tanggul pesisir, serta pembukaan dan pengawasan saluran air. Sedangkan sebagai pembina, pemerintah desa rutin memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan. Kesimpulannya, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan desa pesisir yang tangguh dan berkelanjutan menghadapi perubahan iklim.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Perubahan Iklim, Kebijakan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perubahan iklim *(Climate Change)* merupakan istilah baru yang muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Istilah ini menjadi sering diperbincangkan baik oleh para ilmuwan maupun para pengambil kebijakan karena dampak yang ditimbulkannya.

Berbagai dampak negatif dan positif pada perubahan iklim telah kita rasakan hampir pada semua sektor. Salah satunya di bidang kelautan dan perikanan. Dampak negatif pada bidang kelautan adalah terjadinya kenaikan permukaan air laut akibat kenaikan suhu udara. Hasil kajian IPCC *(Inter Panel Climate Change)*, dalam kurun 1850-2005 telah terjadi kenaikan tinggi permukaan air laut sampai 0,17 meter dengan kenaikan rata-rata 1,8 mm per tahun (Listriani & Roesa, 2015).

Perubahan iklim menyebabkan kerentanan di berbagai wilayah terutama di kawasan pesisir. Selain itu juga bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian dari pemanfaatan sumber daya alam seperti petani, nelayan dan masyarakat yang mencari penghidupan dari sumber daya hutan. Diposaptono (2009) menyebutkan bahwa perubahan iklim menyebabkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain intrusi air laut, gelombang pasang, kekeringan, genangan dan banjir di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan fisik tersebut berimbas pada banyak kehidupan dan penghidupan di kawasan pesisir (Rahful Ahmad Madaual et al., 2023).

Perubahan iklim menjadi masalah yang mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera terutama hal kecil yang terus berulang akan menimbulkan efek yang besar. Pemerintah perlu mengimplementasikan program edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye informasi, pemerintah dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari perubahan iklim. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan lebih terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan (Anargata Febri Rosefi, Amela Ayin Saleha, Friscila Tigustine, 2017).

Desa Tongke Tongke, sebagai bagian integral dari ekosistem global, tidak luput dari dampak perubahan iklim. Desa ini sangat sensitif terhadap perubahan iklim karena lokasinya yang strategis tetapi juga rentan. Desa Tongke Tongke, yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan perikanan, merasakan dampak perubahan iklim. Pemerintah desa sangat penting dalam menghadapi masalah perubahan iklim ini. Sebagai representasi negara di tingkat lokal, pemerintah desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayahnya, sehingga mereka memiliki posisi yang strategis untuk membuat kebijakan yang sesuai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengingat dampak dari perubahan iklim ini sangat kompleks yang mencakup banyak sektor, maka penyelesaian masalah yang dihadapi juga harus dilakukan secara terpadu dari berbagai sektor sehingga adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat disinergikan dalam sistem pembangunan nasional. Perubahan iklim telah terjadi dan

dampaknya sudah dirasakan oleh semua makhluk hidup di belahan bumi ini, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan dampak dari perubahan iklim, baik dengan cara adaptasi, mitigasi atau kombinasi keduanya (Sudarwanto et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan terhadap Perubahan Iklim di Desa Tongke-Tongke. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Desa Tongke Tongke.

Tinjauan Literatur

1. Konsep Peran

Menurut Soekanto (2003:65) dalam Rumlus dkk (2013:3), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peran. Peran itu sendiri merupakan sebuah tanggung jawab seseorang yang mempunyai kedudukan untuk melaksanakan sebuah tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Peran pemerintah juga bisa dikatakan sebagai harapan individu maupun kelompok terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan social (Syaifudin & Ma'ruf, 2022a). Gros, Mason, McEachen Peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap, tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu (Rumlus et al., 2017).

Menurut Poerwodarminta (1995: 571) "peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa". Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan Peran menurut Soerjono (2014:210-211) mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memegang jabatan atau memiliki kekuasaan yang mampu melaksanakan atau merealisasikan suatu hak dan kewajiban yang telah diberikan padanya (Fahira et al., 2021).

Adapun peran itu sendiri adalah Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul *"introduction to International Politics an"* mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (normanorma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Satriyadi, 2022). Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam "peranan" bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi seseorang/lembaga. Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Singkoh, 2018).

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut, Mendapat awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit nyang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Mendapat akhiran "an" yang menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Menurut Marjun, (1989:122) istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas, pekerjaan atau fungsi, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada proyek sedangakan istilah pemerintah menunjuk pada subyek (Ersas A. Gahung, 2017).

b. Pengertian Desa

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah (Singkoh, 2018).

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa.Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat" (Yeyet, 2019).

c. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelengaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Yeyet, 2019). Pemerintah desa merupakan pimpinan tertinggi di desa, oleh sebab itu pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa (Nurhamni, 2020).

Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah "kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan"(A.W. Widjaja, 1983, h.19). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggraan pemerintahan desa merupakan subsistem penye- lenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (Ulumiyah et al., 2019).

d. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai seorang yang memegang kebijakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sahyana (2019:159-160) bahwasanya peran pemerintah desa meliputi 3 variabel yaitu:

1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.
2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksanan program.
3) Peran pemerintah desa sebagai pembina (Syaifudin & Ma'ruf, 2022b).

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang semakin mengancam keberlanjutan sektor-sektor vital, terutama pertanian, yang merupakan sumber utama pangan dan pendapatan bagi masyarakat. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian, dampak perubahan iklim dapat dirasakan secara langsung melalui perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu, dan frekuensi bencana alam (Rozci, 2024).

Perubahan iklim saat ini menjadi tantangan global, hal ini dikarenakan variasi iklim berpengaruh besar terhadap masyarakat di seluruh belahan dunia. Apabila krisis

bencana alam perubahan iklim tidak dikendalikan, maka pada tahun 2030 variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi manusia sudah menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan 50% lebih besar dari saat ini, 45% lebih banyak energy yang dbutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih yang dibutuhkan. Diperkirakan jumlah masyarakat yang kekurangan gizi akan meningkat lebih dari 20 juta orang, 884 juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2.6 miliar orang tidak mempunyai sanitasi dasar (kemenpppa.go.id) (Muhammad Haqiqi, Ahmad Nurjaman, 2024).

Salah satu indikasi dari dampak perubahan iklim tersebut adalah adanya perubahan pola dan intensitas berbagai parameter iklim yang diantaranya terjadinya curah hujan yang tidak menentu, intensitas yang cenderung meningkat dan pergeseran awal serta panjang musim yang menyimpang atau ekstrim dibandingkan dengan kondisi iklim normalnya (Media Indonesia, 2023).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka untuk jenis penelitian mengunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Tahap pengumpulan data penelitian yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, Telaah dokumen dilakukan dengan melakukan kajian mendalam dokumen-dokumen laporan, peraturan peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Tahap pengolahan data dan analisis data penelitian yaitu data hasil penelitian diolah dengan cara penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian yang telah diolah kemudian divaliditasi dengan melakukan trianggulasi data penelitian. Hasil penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Tahap penyusunan hasil penelitian yaitu, data hasil penelitian yang telah diolah dan disusun sesuai dengan analisis data penelitian yang digunakan (Yona Niko Putri & Magriasti, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Tongke-Tongke memiliki peran strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan permasalahan lingkungan di tingkat desa. Menurut Sahyana (2019:159-160) bahwasanya peran pemerintah desa meliputi 3 variabel yaitu Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran pemerintah desa sebagai pelaksanan program.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan

Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang akan di pilih berdasarkan permasalahan yang ada di desa. Sebagai pelaksana kebijakan artinya pemerintah desa mempunyai tanggung jawab atas kebijakan yang sudah ditetapkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada di desa (Syaifudin & Ma'ruf, 2022b). Berdasarkan Penelitian terkait Perumusan Kebijakan terhadap Perubahan Iklim di Desa Tongke-Tongke tentunya Pemerintah Desa mempunyai tugas untuk menentukan sebuah kebijakan terkait dengan perubahan iklim.

Pemerintah Desa Tongke-Tongke memiliki peran yang sangat penting dalam menangani perubahan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk nyata peran tersebut adalah dengan secara aktif mensosialisasikan berbagai kebijakan dan imbauan kepada warga desa. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin dan menggunakan beragam cara agar informasi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain dilaksanakan dalam pertemuan warga, pemerintah desa juga memanfaatkan momen ibadah Jumat di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih mudah memahami dan mengingat arahan-arahan dari pemerintah desa terkait upaya menghadapi perubahan iklim dan ancaman banjir rob.

Pemerintah Desa Tongke-Tongke juga berupaya menciptakan komunikasi dua arah agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Selain memberikan informasi, pemerintah desa secara terbuka menerima masukan dan aspirasi dari warga. Dengan begitu, setiap peraturan maupun program yang disusun bisa lebih tepat sasaran dan bisa diterapkan secara nyata di lapangan. Pendekatan partisipatif ini membuat warga merasa dilibatkan dan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

Selain itu, pemerintah desa secara aktif memantau kondisi di lapangan, khususnya ketika musim hujan tiba. Salah satu arahan yang sering disampaikan adalah agar warga tidak menutup saluran air, sebab hal itu bisa memicu genangan dan memperburuk dampak banjir rob. Dengan pengawasan dan pembinaan seperti ini, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa warga bisa bekerja sama menjaga kebersihan dan kelancaran saluran air agar tidak terjadi luapan saat hujan deras.

Secara keseluruhan, pemerintah Desa Tongke-Tongke berkomitmen penuh dalam menangani perubahan iklim dan mengurangi risikonya terhadap warga. Semua upaya, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan langsung di lapangan, dilakukan agar kebijakan lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim bisa diterapkan secara nyata dan memberi dampak positif. Dengan peran aktif pemerintah desa dan partisipasi warga, diharapkan Desa Tongke-Tongke bisa menjadi contoh desa pesisir

yang tangguh dan mampu menghadapi perubahan iklim secara lebih baik dan berkelanjutan.

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Program

Program menurut Charles O. Jones (1996:294) dalam penelitian Shalfiah (2013:978), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Pemrintah desa sebagai pelaksana program tentunya membuat program-program yang bisa mengatasi permasalahan sosial yang ada dalam lingkup pemerintahannya (Syaifudin & Ma'ruf, 2022b). Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana program, Pemerintah Desa Tongke-Tongke menginisiasi dan melaksanakan berbagai program konkret untuk menghadapi perubahan iklim, terutama banjir rob dan genangan air saat musim hujan. Pelaksanaan program-program ini melibatkan seluruh elemen masyarakat desa agar tujuan bersama bisa tercapai dan dampaknya lebih dirasakan secara nyata.

a. Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove di kawasan pesisir Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam menanggulangi dampak perubahan iklim terutama banjir rob dan genangan air saat musim hujan. Kawasan pesisir Desa Tongke-Tongke diketahui rentan terhadap gelombang laut dan abrasi, sehingga keberadaan mangrove menjadi solusi ekologis yang tepat. Dengan menanam mangrove secara massal, pemerintah desa berupaya melindungi kawasan pantai agar lebih stabil dan tahan terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut. Selain berfungsi sebagai penghalang alami, mangrove juga memperbaiki ekosistem pesisir, memperkuat garis pantai, dan memperkaya keanekaragaman hayati di perairan sekitar desa.

Pelaksanaan program penanaman mangrove melibatkan warga secara aktif agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Desa Tongke-Tongke mendapatkan bantuan penanaman mangrove dan tercatat sekitar kurang lebih 300 warga ikut bergotong royong dalam penanaman mangrove. Partisipasi ini juga menjadi bentuk pembelajaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan ketahanan desa terhadap perubahan iklim.

b. Pembangunan Tanggul di Pesisir

Selain mengoptimalkan penanaman mangrove, pemerintah Desa Tongke-Tongke juga melaksanakan program pembangunan tanggul pesisir sebagai bentuk konkret upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Pembangunan tanggul ini dimaksudkan untuk melindungi pemukiman dan lahan produktif warga dari potensi terjangan gelombang dan abrasi pantai. Dengan adanya tanggul, risiko

masuknya air laut ke permukiman ketika terjadi banjir rob dan pasang besar dapat dikurangi secara signifikan, sehingga aktivitas masyarakat tetap berlangsung tanpa gangguan.

Namun, berdasarkan keterangan pemerintah desa, program pembangunan tanggul ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan biaya sehingga pembangunan tanggul harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah desa tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada, dengan begitu meski belum seluruh pesisir dilindungi tanggul, setidaknya risiko rob sudah berkurang secara signifikan di beberapa lokasi prioritas.

Dengan pembinaan dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan program pembangunan tanggul ini bisa memberi dampak positif dalam melindungi Desa Tongke-Tongke dari ancaman rob dan perubahan iklim di masa mendatang.

c. Pengawasan dan Pembukaan Saluran Air

Selain fokus pada pesisir, pemerintah desa juga memberi perhatian serius pada pengelolaan saluran air di lima dusun. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab genangan dan banjir rob di desa adalah tertutupnya saluran air saat musim hujan. Oleh karena itu, pemerintah desa mengimbau warga untuk membuka saluran agar aliran air tetap lancar dan genangan cepat surut.

Dalam melaksanakan program ini, pemerintah desa melibatkan kepala dusun untuk mengingatkan warga agar jangan menimbun atau menutup saluran air di wilayah masing-masing. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan berkesinambungan ini, pemerintah desa yakin risiko genangan dan banjir rob bisa ditekan secara signifikan

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina

Pemerintah Desa Tongke-Tongke berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga terhadap upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah desa memprioritaskan pembinaan dan edukasi secara rutin agar masyarakat memahami bahwa perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah desa secara aktif melaksanakan pembinaan di berbagai kesempatan, seperti pertemuan warga. Di samping kegiatan sosialisasi, pemerintah desa juga secara aktif melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap warga, terutama menjelang musim hujan. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah imbauan agar warga tidak menutup saluran drainase, sehingga aliran air hujan tetap lancar dan risiko genangan maupun banjir rob dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan edukasi dan contoh nyata kepada

masyarakat agar mereka mau terlibat langsung dalam program-program lingkungan. Contohnya, warga diajak ikut menanam mangrove agar dampak perubahan iklim, seperti banjir rob dan genangan saat musim hujan, bisa diminimalkan.

Di sisi lain, pemerintah desa terus menekankan pentingnya gotong royong dan kerja sama di antara warga. Pemerintah desa percaya bahwa semua program penanggulangan perubahan iklim hanya bisa berjalan baik dan berkelanjutan bila warga mau bergandengan tangan dan saling mendukung.

Pada akhirnya, peran pemerintah desa sebagai pembina menjadi kunci utama dalam membangun budaya peduli lingkungan dan memperkuat ketahanan Desa Tongke-Tongke terhadap dampak perubahan iklim. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan desa ini bisa menjadi contoh desa pesisir yang tangguh, kompak, dan berdaya dalam menghadapi perubahan iklim sekarang maupun di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Tongke-Tongke memiliki peran strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana program, dan pembina.

1. Sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah desa aktif merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan lingkungan melalui pertemuan dengan masyarakat selain itu pemerintah desa juga memanfaatkan momen ibadah Jumat di masjid untuk menyampaikan pesan-pesan penting.. Mereka juga membuka ruang dialog dua arah untuk menerima aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Sebagai pelaksana program, pemerintah desa menjalankan berbagai program nyata seperti penanaman mangrove, pembangunan tanggul pesisir, dan pembukaan saluran air untuk mengurangi risiko banjir rob dan genangan. Program-program ini dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat demi memperkuat ketahanan desa terhadap perubahan iklim.
3. Sebagai pembina, pemerintah desa berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui edukasi dan pembinaan berkelanjutan. Mereka juga menanamkan nilai gotong royong agar upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anargata Febri Rosefi, Amela Ayin Saleha, Friscila Tigustine, M. E. S. (2017). Peran Pemerintah Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Krisis Iklim Global.

Jurnal Hukum Progresif, *XI*(2), 1928–1940.

Ersas A. Gahung, D. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, *Vol. 1,*(1,), h. 5.

Fahira, J., Mahsyar, A., & Haerana. (2021). Peran Aparatur Pemerintah Dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Kimap*, *2*(4), 1332–1344. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index

Listriani, S., & Roesa, N. (2015). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perikanan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *67*, 433–455. http://iklim.dirgantara-lapan.or.id/index.php?option=com,

Media Indonesia. (2023). Penanganan Perubahan Iklim. *Https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Tujuan-13/*, *2008204091*.

Muhammad Haqiqi, Ahmad Nurjaman, H. H. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 358–366.

Nurhamni, I. (2020). Pemberdayaan Pemuda Desa: Motivasi Pemerintah Ululere. *Jurnal Administrator-STIA Pembangunan*, *1*(1), 58–68.

Rahful Ahmad Madaual, La Ibal, & Endang Abubakar. (2023). Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Pesisir Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, *8*(1), 80–92. https://doi.org/10.33772/jpw.v8i1.373

Rozci, F. (2024). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian Padi. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *23*(2), 108. https://doi.org/10.30742/jisa23220233476

Rumlus, R., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). *Jurnal Eksekutif*, *1*(1), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16191

Satriyadi, M. P. (2022). *Peran Pemerintah Desa Terhadap Generasi Milenial Di Laut Dendang*. *1*(1), 1–7.

Singkoh, E. T. S. P. F. (2018). *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. *1*.

Sudarwanto, S., Tjoneng, A., & Suriyanti, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. *AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, *4*(2), 52–64. https://doi.org/10.33096/agrotek.v4i2.132

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022a). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, *February*, 365–380. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380

Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022b). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380

Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., & Mindarti, L. I. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, *1*(5), 890–899.

Yeyet, N. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *6*, 260–269. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3096

Yona Niko Putri, & Magriasti, L. (2022). Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi dalam Program Kampung Iklim di Nagari Paru Sijunjung. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, *1*(3), 243–252. https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.54